

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH,
TEMUAN AUDIT (BPK) DAN LEVERAGE TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Riau)**

Oleh:

Galang Afrian

Pembimbing: R. Adri Satriawan Surya dan Alfiati Silfi

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: afriangalang@gmail.com

*Influence Characteristics Of Local Government, Audit Findings (Cpc) And
Leverage The Performance Of Local Government (Empirical Study Of
Local Government District / City In The Province Riau)*

ABSTRACT

The aim of this study was to test the effect of the characteristics of the local government, the audit findings (CPC) and leverage on the performance of local government (Local Government empirical studies regencies / cities in Riau Province). Population in this research is the Regional Government of Regency / City in Riau Province has all the complete data include: Balance to get the Total Assets, Budget Realization Report (LRA) to get the PAD, DAU, DAK, Sharing and total realization of the budget revenues, as well as the need BPK audit examination report in 2009-2013 to get the number of audit findings. Data used in this research is secondary data. Data collection techniques in this research is the study of documentation and literature. The data analysis using descriptive method and multiple regression formula. From the research results showed the influence of regional wealth levels of local government performance is positive and significant. Influence shopping areas, audit findings and leverage of local government performance is positive and significant. Based on the results of research known that all independent variables have a strong relationship with local government performance. Also showed that the level of regional wealth, shopping areas, audit findings and jointly leverage effect on the performance of local governments amounted to 76.90%. For authors suggest that this research is still in need of some repairs to be done in future studies related to the object of study similar to this study in the future, such as by adding a few other variables to analyze the performance of local government.

Keywords: Characteristics, Audit, Leverage and Performance.

PENDAHULUAN

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan harus

dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) suatu

pemda, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemeriksaan didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK salah satunya berupa temuan audit. Hasil penelitian Mustikarini dan Fitriarsi (2012) dan penelitian Budianto (2012) menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan semakin besar temuan audit menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemda terhadap peraturan perundangan. Dengan demikian temuan audit BPK dapat memengaruhi kinerja pemda kabupaten/kota.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2008), sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh penyedia jasa dan barang-barang publik. Wood dalam Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa

fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik. Penelitian yang dilakukan Mandell dalam Sumarjo (2010) juga mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemda memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian terkait kinerja pemda dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriarsi (2012). Sudarsana dan Rahardjo (2013) juga melakukan penelitian yang sama yaitu menguji pengaruh ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2010; namun penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian Mustikarini dan Fitriarsi (2012) bahwa tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota, sedangkan hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan tidak ada tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dilihat dari variabel tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, dan temuan audit (BPK). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini merupakan

pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasisari (2012), dimana penulis menambah satu variable lagi yakni temuan audit (BPK), adanya penambahan periode pengamatan yang diteliti adalah tahun 2010-2013 dan juga tempat penelitian dimana penelitian ini dilakukan pada pemda kabupaten/kota di Propinsi Riau. Peneliti tertarik melakukan penelitian ulang untuk menguji konsistensi hasil penelitian untuk memperkuat hasil sebelumnya karena adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasisari (2012) dan Sudarsana dan Rahardjo (2013).

Sebagai variabel pertama (X1) dalam penelitian ini adalah Tingkat Kekayaan Daerah yang diproksikan dengan PAD menunjukkan seberapa besar pemda mampu menghasilkan pendapatan dari daerahnya sendiri. Penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan PAD yang diterima daerah akan digunakan pemda untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga akan mencerminkan semakin baik pelayanan pemda. Dengan demikian tingkat kekayaan daerah (PAD) dapat memengaruhi kinerja pemda kabupaten/kota. Penelitian Mustikarini dan Fitriasisari (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda. Hasil penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasisari (2012) pada variabel belanja daerah memotivasi peneliti untuk menguji kembali variabel tersebut.

Selanjutnya variabel ketiga (X3) dalam penelitian ini adalah

temuan audit (BPK). Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasisari (2012) sendiri yang hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Lebih lanjut, penelitian ini menambahkan variabel *leverage* sebagai variabel bebas keempat (X4) untuk mengukur pinjaman/utang pemda, karena pemda biasanya memiliki utang baik utang jangka panjang ataupun jangka pendek. Peneliti menganggap bahwa ada hubungan antara *leverage* dengan kinerja pemda. Sesuai dengan penelitian Sumarjo (2010) bahwa semakin besar *leverage* pemda maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditur akan semakin ketat. Berdasarkan hasil penelitian Sumarjo (2010) *Leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kusumawardani (2012) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah

(studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau)? 2) Apakah temuan audit (BPK) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau)? 3) Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau)?

Penelitian ini bertujuan 1). Menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau). 2) Menguji pengaruh temuan audit (BPK) terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau). 3) Menguji pengaruh leverage terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau).

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit (BPK) dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau). 2) Sebagai bahan informasi bagi Instansi yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit (BPK) dan leverage terhadap kinerja pemerintah daerah. 3) Sebagai bahan pembandingan bagi penelitian terdahulu sekaligus sumber referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Juliawati, *et al*, (2012) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :“Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Adapun jenis belanja daerah menurut PSAP No.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagi ke dalam enam pos, yaitu :

1. Belanja Jalan, Irigasi, dan lainnya
2. Belanja aset tetap lainnya
3. Belanja aset lainnya
4. Belanja Tanah
5. Belanja Mesin
6. Belanja Gedung dan Bangunan

Temuan Audit (BPK)

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Pramono, 2008). Menurut Hall (2007) audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli-auditor-yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan organisasi/instansi. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen.

Penelitian yang dilakukan Bernstein (2000) dalam Mustikarini dan Fitriyasi (2012) menyimpulkan adanya hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja

dan evaluasi program.Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

Berdasarkan UU No. 15/2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Leverage

Rasio ini menunjukkan kemampuan organisasi/instansi untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya.Definisi *leverage* menurut Sartono (2008:257) adalah sebagai berikut:*Leverage* adalah penggunaan *asset* dan sumber dana oleh organisasi/instansi yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial stakeholder.

Menurut Sjahrian (2009:147) mendefinisikan *leverage* sebagai berikut:*Leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh organisasi/instansi yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti dari sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial stakeholder.Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa *leverage* adalah penggunaan *asset* dan sumber dana yang memiliki biaya atau beban tetap yang berasal dari pinjaman dengan maksud agar meningkatkan

keuntungan potensial stakeholder sehingga dapat menggambarkan hubungan antara utang organisasi/instansi terhadap utang maupun aset. Menurut Halim (2011:51) leverage dibagi menjadi tiga, yaitu *operating leverage*, *financial leverage*, dan *combined leverage*.

Rasio *leverage* yang mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik organisasi/instansi dengan dana yang berasal dari kreditor organisasi/instansi, mengandung beberapa implikasi.

Sedangkan menurut Darsono dan Ashari (2008:77) jenis-jenis rasio *leverage* sebagai berikut:

- a. Debt Assets Ratio (DAR)
- b. Debt Equity Ratio (DER)
- c. Equity Multiplier (EM)
- d. Interest Coverage (IC) atau Times Interest Earned

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010:14). Menurut Stephen P Robbin (2008:92), kinerja adalah ukuran hasil kerja yang dilakukan dengan menggunakan kriteria yang disetujui bersama. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan.

Di dalam Pasal 5 Permendagri No.73/2009 ini, LPPD digunakan sebagai sumber informasi utama EKPPD yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan

Indikator Kinerja Kunci (IKK). Aspek tataran pengambilan kebijakan pada pengukuran indeks capaian kinerja dengan menilai IKK meliputi:

1. Ketentraman dan ketertiban umum daerah,
2. Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah,
3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah,
4. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD,
5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan,
6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan,
7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan,
8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.
9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan bagi hasil,
10. Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD,
12. Pengelolaan potensi daerah dan

13. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian mengenai PAD, salah satunya dilakukan oleh Hadi, Hendri, dan Inapty (2009) yang mengungkapkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap jumlah belanja daerah pemerintah daerah. Belanja daerah ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho dan Rohman, 2012).

b. Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 1 huruf q, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No.32 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembangunan untuk belanja daerah sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas sdm, dll. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Purba (2006) yang membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Kabupaten Simalungun dan Rustiono (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau.

c. Temuan Audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian yang menghubungkan

temuan audit dengan kinerja pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menghasilkan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu

d. Leverage terhadap kinerja pemerintah daerah

Pemerintah daerah yang memiliki pinjaman tinggi maka akan menggambarkan bahwa kinerja pemda tersebut rendah, sebaliknya bila struktur pendanaan pemda dari pinjaman kecil/rendah maka akan menunjukkan kinerjanya bagus. Hal ini dikarenakan pinjaman akan memberikan dampak pada penurunan kinerja di kemudian hari dengan kewajiban pelunasan dan pembayaran bunga yang akan membebani pemda tersebut. Besarnya pinjaman juga menggambarkan ketidakmampuan pemda dalam membiayai kegiatan pelayanan publik dengan\ kemampuan internal organisasi. Hasil penelitian Sumarjo (2010) dan hasil penelitian Widya dan Debby (2012) sama-sama menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja pemda.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Neraca untuk mendapatkan Total Aset, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, DAK Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Jumlah sampel adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh 12 Kota/Kabupaten di Propinsi Riau dari tahun 2009-2013 (12 x 5 tahun = 60).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data untuk variabel temuan audit BPK tahun 2009-2013 pada *website* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data neraca Pemda didapatkan melalui laporan keuangan Propinsi Riau.

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen.

Variabel dependen dalam, penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006:117). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Variabel Independen.

- a. Karakteristik Pemerintah daerah (X) dalam penelitian ini dinilai dari :
 - 1) Variabel Tingkat Kekayaan Daerah (X1). Menurut Abdullah (2004), Kekayaan (wealth) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan diukur dengan PAD.
 - 2) Variabel Belanja Daerah (X2). Menurut UU No.32 Tahun 2004, Belanja Daerah adalah

semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Maka pada penelitian ini variabel belanja daerah diukur dengan Total Realisasi Belanja Daerah.

- b. Variabel Temuan Audit BPK (X3). Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung dan adanya temuan audit di beberapa daerah. Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasisi (2012), temuan audit BPK diukur dengan temuan audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasisi (2012), variabel temuan audit BPK penelitian ini menggunakan temuan audit (dalam rupiah).
- c. Variabel Leverage (X4). *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset organisasi/instansi. Dalam penelitian ini untuk mengukur leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 1) Studi dokumentasi. 2) Studi pustaka.

Metode Analisis

Menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression liniear analysis*).

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam, penelitin ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006:117). Berdasarkan hasil penelitian diketahui kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) dari tahun 2009-2013 tertinggi adalah 0,82 yang diperoleh Kabupaten Rokan Hilir tahun 2009 dan terendah adalah 0,01 yang diperoleh Kabupaten Rokan Hulu tahun 2010-2011.

Variabel Independen.

Variabel Tingkat Kekayaan Daerah (X1).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kekayaan daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) dari tahun 2009-2013 tertinggi adalah 1,57 yang diperoleh Kota Dumai tahun 2010 dan terendah adalah 0,01 yang diperoleh Kabupaten Meranti tahun 2010.

Variabel Belanja Daerah (X2).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui belanja daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) dari tahun 2009-2013 tertinggi adalah 1,68 yang diperoleh Kabupaten Meranti tahun 2011 dan terendah adalah 0,04 yang diperoleh Kabupaten Rokan Hilir tahun 2012.

Variabel Temuan Audit BPK (X3).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui temuan audit kabupaten/kota di Propinsi Riau) dari tahun 2009-2013 tertinggi adalah 0,59 yang diperoleh Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2010 dan terendah adalah 0,02 yang diperoleh Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2013.

Variabel Leverage (X4).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui leverage kabupaten/kota di Propinsi Riau) dari tahun 2009-2013 tertinggi adalah 1,46 yang diperoleh Kabupaten Kampar tahun 2010 dan terendah adalah 0,01 yang diperoleh Kabupaten Meranti tahun 2011.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Pengujian Normalitas Data

Dalam penelitian ini, uji normalitas data yang digunakan uji statistic *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai yang signifikansinya telah ditentukan yaitu sebesar 5% (0,05). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS 18.0 *for windows* diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z untuk masing-masing variabel diatas 0,05. Perbandingan antara nilai Kolmogorov-Smirnov Z dengan

standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilainya lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian normal.

Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2006). Pada output bagian ini, terlihat bahwa dari masing-masing variabel independen dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini bahwa uji multikolinearitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson Test, pada tabel Model Summary diatas diperoleh hasil Durbin Watson Statistic berada pada 1,882. Dari hasil penelitian nilai Durbin Watson Statistic berada pada kisaran -2 sampai + 2, oleh karena itu diputuskan bahwa model ini sudah terbebas dari kemungkinan adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji Heteroskedastisitas menggunakan *Uji Glejser*. Dari output hasil penelitian diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Program SPSS for Windows versi 18 diperoleh koefisien pada persamaan Regresi Linier Berganda :

$$Y = 0,004 + 0,474X_1 + 0,761X_2 + 0,196X_3 + 0,430X_4 + e$$

Arti persamaan regresi linear tersebut adalah :

1. Nilai $b_0 = 0,004$ menunjukkan bahwa apabila tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leveragenaik 1 satuan, maka kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) tersebut akan mengalami peningkatan sebesar 0,004 satuan.
2. Nilai $b_1 = 0,474$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel tingkat kekayaan daerah (X_1) naik 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) juga akan naik sebesar 0,474 satuan dengan asumsi variabel X_2 , X_3 dan X_4 tetap atau konstan.
3. Nilai $b_2 = 0,761$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel belanja daerah (X_2) naik 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) tersebut akan naik sebesar 0,761 satuan dengan asumsi variabel X_1 , X_3 dan X_4 tetap atau konstan.
4. Nilai $b_3 = 0,196$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel temuan audit BPK (X_3) naik 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) tersebut naik sebesar 0,196

satuan dengan asumsi variabel X_1 , X_2 dan X_4 tetap atau konstan.

5. Nilai $b_4 = 0,430$ menunjukkan bahwa apabila nilai variabel leverage (X_4) naik 1 satuan maka kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) tersebut akan naik sebesar 0,430 satuan dengan asumsi variabel X_1 , X_2 dan X_3 tetap atau konstan.

Uji-t (korelasi parsial)

Nilai t-tabel hasilnya adalah : 2,00. Hasil Uji parsial (t) atas variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Tingkat kekayaan daerah (X_1) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.**
 Nilai t-hitung tingkat kekayaan daerah (X_1) yaitu 7,353. Nilai ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 2,00. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga tingkat kekayaan daerah (X_1) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau).
2. **Belanja daerah (X_2) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.**
 Nilai t-hitung belanja daerah (X_2) yaitu 11,768. Nilai ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 2,00. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga belanja daerah (X_2) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. **Temuan audit BPK (X_3) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.**

Nilai t-hitung temuan audit BPK (X3) yaitu 3,057. Nilai ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 2,00. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga temuan audit BPK (X3) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau).

4. Leverage (X4) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Nilai t-hitung leverage (X4) yaitu 6,587. Nilai ini lebih besar dari pada t-tabel yaitu 2,00. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga leverage (X4) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau).

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua variabel bebas yaitu tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leverage mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) (Y) hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,886. Juga dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (*Adjusted R Square*) sebesar 0,769, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leverage dapat menjelaskan kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) sebesar 76,90%.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pada pengujian hipotesis berdasarkan hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leverage secara serentak/simultan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau). Dari hasil ini dapat dilihat bahwa semakin baik/tinggi tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leveragetentunya akan menghasilkan kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) yang baik pula serta memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriarsi (2012) yang menguji pengaruh ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. Sudarsana dan Rahardjo (2013) juga melakukan penelitian yang sama yaitu menguji pengaruh ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2010; namun penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian Mustikarini dan Fitriarsi (2012) bahwa tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap

skor kinerja pemda kabupaten/kota, sedangkan hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan tidak ada tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Sedangkan dalam penelitian ini menyatakan secara parsial seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) karena dapat dibuktikan dengan analisa secara statistik dan yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Riau) adalah belanja daerah karena memiliki nilai t hitung paling besar. Berikut penjabaran hasil penelitian dari masing masing hipotesis

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif dan signifikan.
2. Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (studi empiris pemerintah daerah) adalah positif dan signifikan.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif dan signifikan.
4. Pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh leverage terhadap kinerja pemerintah daerah adalah positif dan signifikan.

5. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan yang kuat dengan kinerja pemerintah daerah. Juga menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, temuan audit BPK dan leverage secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar 76,90%.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini masih membutuhkan beberapa perbaikan untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya terkait dengan objek kajian yang sejenis dengan penelitian ini di masa mendatang, diantaranya dengan menambah beberapa variabel lain untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah.
2. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan penelitian. Pengetahuan teknis yang terbatas merupakan faktor yang paling dominan dalam keterbatasan penelitian ini yang menyebabkan beberapa kekurangan mendasar dalam penelitian ini. Kekurangan-kekurangan itu antara lain alat analisis yang terbatas, penggunaan bahasa yang tidak ilmiah dan beberapa kekurangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**, Edisi Pertama, Penerbit BPFE UGM, dan Pusat Pengembangan Akuntansi. UGM.

- Bernstein, 2000. **Hubungan Antara Pengukuran Kinerja Pemda dan Sistem Pengawasan, Termasuk Audit Kinerja dan Evaluasi Program.**
- Budianto, D.J. 2012. **Sistem Administrasi Keuangan Daerah.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Choiriyah, Umi. 2010. **Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia.** Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal,** Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta
- Darsono dan Ashari (2008:77), tentang **Jenis – Jenis Rasio Leverage.**
- Ghozali, Imam. 2006. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS,** Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadi, Abdul, Sapto Hendri dan Biana Adha Inapty. 2009. **Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.** Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Halachmi, 2005. **Akuntansi Pemerintahan di Indonesia,** PT Refika Aditama, Bandung.
- Halim, Abdul, 2006. **Akuntansi Keuangan Daerah,** Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hall A. James, 2007. **Sistem Informasi Akuntansi,** Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat
- Hariato, David dan Priyo hadi Adi. 2007, **Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita.** Simposium Nasional Akuntansi. Juli. Makassar
- Hartas, Deddi. 2011. **Akuntansi Sektor Publik.** Salemba Empat. Jakarta.
- Juliawati, 2012. **“Konsep dan Alokasi DAU”,** IUC-Economics-UI, Jakarta.
- Julitawati Ida, Darwanis dan Jalaluddin, 2012 **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.** Jurnal Akuntansi Vol 1, No.1, Tahun 2012
- Kepmendagri No.29 Tahun 2002 Pasal 1 Huruf q , tentang **Belanja Daerah**
- Kusumawardani, Media, **Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia,** Accounting Analysis

- Journal <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Mardiasmo. 2008. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Andi. Yogyakarta.
- Mustikarini, Widya Astuti, dan Debby Fitriyani. 2012. **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**. Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin
- Pasal 5 Permendagri No.73/2009, tentang **LPPD Sebagai Sumber Informasi Utama EKKPD**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat**
- Pramono, 2008. “**Klasifikasi Belanja Daerah**”. Kursus keuangan daerah (KKD)
- PSAP No.2 tentang **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010**.
- Purba (2006), tentang **Kinerja Ekonomi Makro**.
- Robbins, Stephen P, 2008, **Perilaku Organisasi**, Edisi kesepuluh, PT Indeks, Jakarta
- Sadjiarto. 2000. **Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference**. LPEM-UI. Jakarta.
- Sartono. (2008:257), tentang **Leverage Sebagai Penggunaan Aset dan Sumber Dana Oleh Organisasi/Instansi**.
- Setiawan.2012. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sjahrian (2009:147) , tentang **Penggunaan Aktiva dan Sumber Dana Oleh Organisasi/Instansi**.
- Sudarsana dan Budi Rahardjo. 2013. **Laporan Keuangan**. Yogyakarta : UGM Press
- Suhardjanto, Djoko, 2010, **Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)** Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Suhendra. 2010. “**Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002**”. Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Sumarjo, Ardi 2010, **Pengaruh ukuran (size), kemakmuran (wealth), ukuran (size) legislatif, leverage, dan intergovernmental Revenue terhadap kinerja keuangan**, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta